KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI KEMENTERIAN KOORINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Nomor: 9 /Pansel-JPT-Polhukam/7/2020

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. JPT yang lowong
   Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhineka-an
2. Persyaratan umum
   1) Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
   2) Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 30 September 2020;
   3) Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tk. I (IV/b) dan pernah atau sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
   4) Sekurang-kurangnya telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III atau yang disetarakan, diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II atau yang disetarakan;
   5) Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
   6) Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   7) Mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang;
   8) Memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai;

9) Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S-1), diutamakan Magister/Pascasarjana (S-2);
10) Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
11) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12) Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara pada jabatan terakhir;
13) Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
14) Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh Pelamar dan bermaterai Rp. 6000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

3. Persyaratan khusus

Untuk Jabatan Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhineka-an dengan mengutamakan standar kompetensi bidang yang memiliki pengalaman dan penugasan terkait mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang Mempeteguh Ke-Bhineka-an.

1.1. STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	Nama Jabatan	:	**Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhineka-an**
2.	Eselon/Jenjang Jabatan	:	**Eselon II.a**
3.	Unit Kerja	:	**Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

No	Kompetensi	Level
1	2	3
1.	Integritas	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi (Int. 4)
2.	Kerjasama	Membangun komitmen tim sinergi (K.4)

3.	Komunikasi	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan (K.4)
4.	Orientasi pada hasil	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya (O.4)
5.	Pelayanan Publik	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional (P.4)
6.	Pengembangan diri dan orang lain	Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran (P.4)
7.	Mengelola perubahan	Memimpin perubahan pada unit kerja (M.4)
8.	Pengambilan Keputusan (PK)	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan mitigasi risiko (PK.4)

1.2. STANDAR KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

1.	Nama Jabatan	:	**Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhineka-an**
2.	Eselon/Jenjang Jabatan	:	**Eselon II.a**
3.	Unit Kerja	:	**Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

No	Kompetensi	Level
1	2	3
1.	Perekat Bangsa	Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi (M.4)

4. Waktu dan Tata Cara Pendaftaran
   a. Pendaftaran dimulai tanggal 13 Juli 2020 ditutup pada tanggal 17 Juli 2020;
   b. Surat lamaran di atas kertas bermaterai Rp 6.000,- ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan dikirimkan melalui alamat email **polhukam.kepeg@gmail.com** dan **kepeg@polkam.go.id** dengan melampirkan:
      1) Daftar Riwayat Hidup (sesuai dengan format terlampir);
      2) Daftar Rekam Jejak (sesuai dengan format terlampir);
      3) Salinan sah petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
      4) Salinan sah petikan keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
      5) Fotocopy tanda bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) / Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
      6) Salinan sah penilaian prestasi kerja, dua tahun terakhir;
      7) Surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang (tautan contoh Surat Persetujuan terlampir);
      8) Salinan sah ijazah pendidikan terakhir;
      9) Fotocopy sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II atau III atau yang disetarakan;
      10) Fotocopy sertifikat Pendiidkan dan Pelatihan Teknis yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki;
      11) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
      12) Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6;
      13) Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi wewenang;
      14) Surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah.

   c. Tahapan seleksi sebagai berikut:

NO	TAHAPAN	PELAKSANAAN
1	Pengumuman dan Penerimaan berkas lamaran seleksi terbuka pengisian JPT Pratama Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhineka-an	13 – 17 Juli 2020
2	Pengolahan data dan verifikasi berkas kandidat	20 - 21 Juli 2020
3	Pengumuman hasil seleksi administrasi	24 Juli 2020
4	Rapat Persiapan dengan Para Kandidat yang lulus administrasi (*Video Conference*)	29 Juli 2020
5	Tes Kompetensi Bidang (Media Online)	4 Agustus 2020

6	Tes Assesment (Media Online)	5 Agustus 2020
7	Rekam Jejak, Paparan Visi dan Misi, serta Wawancara (*Video Conference*)	6 Agustus 2020

Apabila ada perubahan jadwal kan diumumkan lebih lanjut melalui situs Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, **www.polkam.go.id**

5. Ketentuan Lain-Lain
   a. Selama proses seleksi, pelamar tidak dipungut biaya dan panitia tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh pelamar.
   b. Panitia Seleksi tidak melayani surat-menyurat dan korespondensi lainnya.
   c. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 13 Juli 2020
Ketua Panitia Seleksi,

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN RI

Tri Soewandono